

Polisi Usut TPPU di Kasus 110 Kilogram Sabu Milik Murtala

JAKARTA (IM) - Bandar narkoba Murtala Ilyas (42) kembali ditangkap polisi. Selain soal peredaran narkoba, polisi akan mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Tidak menutup kemungkinan akan kita lanjutkan ke tindak pidana pencucian uang," kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M Syahduddi kepada wartawan di Polres Metro Jakbar, Rabu (6/3).

Untuk diketahui, Murtala juga pernah dipenjara terkait kasus TPPU narkoba. Polres Metro Jakbar juga membentuk tim khusus untuk menyelidiki aset maupun harta yang dimiliki Murtala.

"Langkah-langkah yang dilakukan penyidik nantinya mengarah pada adanya tindak pidana lain selain tindak pidana narkoba ini, maka tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan ataupun menerapkan pasal-pasal TPPU di dalam kasus ini," ujarnya.

Untuk menangani kasus tersebut, Polres Metro Jak-

bar berkoordinasi dengan ahli tindak pidana pencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aset dan harta yang dimiliki Murtala.

"Si M ini adalah pemain besar narkoba dan juga kita identifikasi sebagai residivis tindak pidana pencucian uang karena yang bersangkutan pernah berurusan terkait TPPU beberapa waktu yang lalu," kata dia.

Terkini, Murtala ditangkap terkait pengedaran sabu jaringan Malaysia-Aceh-Medan-Jakarta. Polisi menyita sabu seberat 110 kilogram (kg) dari sejumlah lokasi. Ditsisir, sabu 110 kg tersebut nilainya mencapai Rp198 miliar. Atas perbuatannya, Murtala bersama anak buahnya terancam hukuman pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dan pidana denda minimal Rp 1 miliar dan maksimal Rp 10 miliar ditambah sepertiga. ● han

Dua Pegawai KPK Kembali Diperiksa Terkait Dugaan Pungutan Liar di Rutan

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa dua orang pegawainya terkait dugaan pungli di rutan KPK, Rabu (6/2).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan, keduanya diperiksa dalam kapasitas mereka sebagai saksi.

"Hari ini (6/3) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Nazar dan Maranatha," kata Ali melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/3).

Ali menjelaskan, kedua saksi tersebut merupakan bertugas sebagai pengamanan di lingkungan komisi antirasuah. Juru bicara bidang penindakan KPK itu pun belum memberikan materi apa yang akan diklarifikasi terhadap mereka yang hari ini diperiksa.

Sebelumnya, KPK kemarin menjadwalkan peme-

riksaan terhadap dua pegawai terkait kasus yang sama.

"Bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Farhan dan Kinsun Kase," kata Ali melalui keterangan tertulisnya.

Dalam keterangannya, Ali menyebutkan keduanya bertugas sebagai pengamanan. Sekadar informasi, Ali menyebutkan dalam perkara tersebut pihaknya telah menetapkan tersangka. Jumlahnya lebih dari 10 orang.

Kasus tersebut pun diusut Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Sejauh ini Dewas telah menyidangkan 90 pegawai KPK. 78 diantaranya diputus melakukan pelanggaran kode etik berat dan 12 lainnya diserahkan ke Sekjen KPK.

Dewas juga dalam persiapan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terhadap tiga pegawai KPK lainnya. ● han

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



SERAH TERIMA JABATAN PANGLI MA KOARMADA II

Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Herru Kusmanto (tengah) bersama Panglima Koarmada II Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo (kiri) dan Laksamana Madya TNI Denih Hendrata (kanan) melakukan salam komando usai upacara Serah Terima Jabatan Panglima Koarmada II di Koarmada II, Surabaya, Jatim, Rabu (6/3). Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Herru Kusmanto memimpin langsung upacara serah terima jabatan Panglima Koarmada II dari Laksamana Madya TNI Denih Hendrata kepada Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo.

Pimpinan KPK Menyebut Bagi-bagi "Fee" 5-15 Persen Proyek Pemerintah Sudah Lazim

Wakil Ketua KPK menyebut, nilai belanja pemerintah menyangkut pengadaan barang dan jasa sangat besar dan kerap ditemukan praktek korupsi.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut bahwa pemberian fee sebesar 5-15 persen untuk setiap proyek pemerintah merupakan hal yang lazim.

Pernyataan itu Alex sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang digelar Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Rapat itu dihadiri sejumlah perwakilan kementerian/lembaga termasuk perwakilan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Alex mengatakan, nilai

belanja pemerintah menyangkut pengadaan barang dan jasa sangat besar dan kerap ditemukan praktek korupsi.

"Permintaan fee itu sudah menjadi suatu yang lazim. Fee proyek antara 5 sampai 15 persen itu adalah sesuatu yang lazim," kata Alex di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (6/3).

Alex yakin, para APIP di lingkungan pemerintah daerah juga mengetahui bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu dikorupsi. Belanja negara itu diwarnai persekongkolan hingga kesepakatan jahat antara pemerintah terkait dengan vendor atau perusahaan penyedia barang. Namun, para APIP itu

kerap merasa sungkan karena tidak jarang perusahaan yang dihadapi dekat dengan pusat kekuasaan.

"Bapak ibu ya agak sedikit mungkin sungkan ketika berhadapan dengan vendor yang kemudian bapak ibu ketahui ada hubungannya dengan ya pimpinan tertinggi di daerah tersebut," ujar Alex.

Alex menyarankan, jika para APIP menghadapi situasi tersebut mereka bisa melaporkan dugaan korupsi itu ke aparat penegak hukum setempat.

Meski demikian, Alex juga mengetahui bahwa aparat penegak hukum di daerah juga terikat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Karena itu, Alex mendorong agar mereka melaporkan dugaan korupsi itu ke KPK. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti aduan yang masuk.

"Laporkan ke KPK. Eng-

gak usah ragu, tidak usah ragu bapak ibu sekalian, kami akan melindungi siapa pihak

pelapor dan kami akan menindaklanjuti tentu saja," tutur Alex. ● han

KPK Diingatkan Hati-hati Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi terhadap Ganjar

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar berhati-hati dalam menindaklanjuti laporan terkait dugaan korupsi yang melibatkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

"KPK mesti juga berhati-hati dalam merespons semua laporan, mesti berdasarkan bukti-bukti saksi-saksi yang lengkap," kata Habiburrokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/8).

Politikus Partai Gerindra ini menuturkan, masyarakat tidak bisa dilarang untuk melaporkan kasus dugaan korupsi seseorang ke KPK. Akan tetapi, lembaga antirasuah itu juga harus berhati-hati karena Ganjar adalah salah satu tokoh politik yang menjadi sorotan masyarakat saat ini.

Habiburrokhman mewan-ti-wanti agar jangan sampai ada anggapan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan KPK adalah bentuk politisasi hukum dan kriminalisasi terhadap mantan gubernur Jawa Tengah itu.

"Jadi silakan masyarakat menyampaikan laporan tapi KPK-nya saya percayakan

agar KPK untuk benar-benar memeriksanya secara profesional," ujarnya.

Seperti diketahui, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh, melaporkan Ganjar Pranowo dan eks Direktur Utama Bank Jateng berinisiasi S ke KPK terkait penerimaan gratifikasi atau suap berupa *cashback* dari perusahaan asuransi.

"IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap yang diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi," kata Sugeng saat dikonfirmasi, Selasa (5/3).

Sugeng mengatakan, perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai *cashback*. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari Rp 100 miliar. Ganjar telah membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tak pernah menerima gratifikasi dari pihak mana pun.

"Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia tuduhkan," kata Ganjar, dilansir dari *Antara*. ● han

KPK Lakukan Pengembangan Kasus Suap Sekretaris Nonaktif MA Hasbi Hasan

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengembangan dugaan korupsi Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan, terdakwa kasus dugaan suap hakim agung menyangkut pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, perkara yang baru ini juga masih dalam lingkup dugaan tindak pidana suap.

"Ada pengembangan terkait dengan dugaan pemberian suap," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (6/3).

Ali mengatakan bahwa perkara baru yang tengah diusut KPK itu berbeda dari perkara suap yang saat ini bergulir di pengadilan. Ali mengatakan, dalam proses hukum tidak diperbolehkan aparat mengusut perkara sama yang telah disidangkan.

Meski demikian, penegak hukum tetap bisa mengusut ketika terdapat perkara lain yang berhubungan dengan substansi perkara pertama. Sayangnya, Ali tidak menjelaskan secara detail dugaan suap apa yang tengah diusut penyidik.

Ia hanya menyatakan bahwa KPK akan mengembangkan kasus itu lebih lanjut di tingkat penyidikan.

"Nanti perkembangannya kami sampaikan," ujar Ali.

Dalam perkara pokoknya, KPK menduga Hasbi Hasan menerima jatah Rp3 miliar untuk mengondisikan perkara kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Suap diberikan oleh pengusaha sekaligus debitur KSP Intidana yang sedang beperkara di MA, Heryanto Tanaka, melalui perantara mantan Komisaris Independen Dadan Tri Yudianto.

Dari Tanaka, Dadan menerima uang Rp11,2 miliar dalam tujuh kali transfer. Perkara ini merupakan rangkaian kasus suap jual beli perkara di MA yang dibongkar KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada September tahun lalu.

Terbaru, KPK menetapkan Hasbi Hasan dan orang dekatnya sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Orang dekat tersebut adalah artis bernama Windy Yunita Ghemary atau Windy Idol dan kakaknya.

Windy dan kakaknya telah diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat. Baca juga: Jaksa Ulik Kebersamaan Hasbi Hasan dan Windy "Idol" di Bali, Tampilkan Video Naik Helikopter Ketika Penyidik, KPK menduga Windy mengolala atau menggunakan aset milik Hasbi di Jakarta Selatan. ● han

MK Gelar Simulasi PPHU Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar simulasi penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024. Kegiatan simulasi diikuti pegawai yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan Perkara PPHU Tahun 2024 di Aula Lantai Dasar dan Area Lobi Gedung 1, 2, dan 3 MK, pada Rabu (6/3).

Ketua MK, Suhartoyo membuka secara langsung simulasi akbar pada pagi ini untuk memberikan pembekalan kepada Gugus Tugas.

"Turut hadir Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP, Ikhwan Mulyawan memberi paparan mengenai penguatan sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko serta me-

nyajikan statistik data perkara. Serta Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto yang menyajikan pengolahan statistik data perkara hasil Pemilu 2024," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono dalam keterangan tertulis.

Simulasi akbar PPHU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan DPD (Pileg) berlangsung sesuai tahapan, mulai dari pra registrasi, pasca registrasi, dan pasca putusan.

Simulasi pra registrasi terdiri dari pengajuan permohonan, verifikasi berkas, registrasi, dan pengolahan data permohonan, hingga persiapan persidangan. Kemudian simulasi pasca registrasi meliputi penyampaian salinan permohonan, panggilan sidang,

dan persidangan. Terakhir, tahapan pasca putusan PPHU.

"Pada saat simulasi, beberapa pegawai berperan sebagai Pemohon dengan diminta menunjukkan identitasnya. Kemudian, mengambil nomor urut pengajuan permohonan (NUPP), menyerahkan berkas, hingga verifikasi berkas di meja registrasi," kata Fajar.

"Selanjutnya, berkas diolah oleh petugas sesuai dengan peran dan fungsinya. Untuk diketahui, jangka waktu pengajuan permohonan ke MK untuk Pilpres paling lama 3 hari setelah pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU. Sedangkan, untuk Pileg paling lama 3 x 24 jam sejak pengumuman perolehan suara oleh KPU," tandasnya. ● mei



RAKER KOMISI X DPR DENGAN KEMENDIKBUDRISTEK Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim (kanan) berbincang dengan Sekjen Kemendikbudristek Suharti disela mengikuti rapat kerja bersama Komisi X DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3). Rapat kerja tersebut membahas realisasi program dan anggaran sampai akhir Desember 2023 serta membahas surat permohonan Mendikbudristek mengenai pembaharuan persetujuan lembar pengesahan pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2024.

Polisi Bagi-bagi Helm kepada Pengendara yang Tertib Lalu Lintas

JAKARTA (IM) - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Jakarta Selatan membagikan beberapa helm kepada sejumlah pengendara yang terbukti tertib berlalu lintas. Pemberian helm dilakukan bertepatan dengan Operasi Keselamatan Jaya 2024 yang digelar di persimpangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (6/3).

Mulanya, aparat mem-berhentikan beberapa pengendara secara acak di area lampu merah persimpangan Pasar Minggu, tepatnya di lampu merah Jalan Raya Ragunan. Petugas kemudian mengecek surat-surat kelengkapan kendaraan berkendaraan secara seksama. Mulai dari SIM, STNK, hingga kualitas helm yang dikenakan.

Salah satunya dilakukan petugas kepolisian terhadap siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) yang kebetulan melintas. Saat diberhentikan, siswi tersebut mulanya tampak panik karena diberhentikan beberapa polisi.

Namun, karena hanya diminta menunjukkan SIM dan STNK, raut wajah panik yang terlihat seketika sirna.

"Jangan panik, kami mau cek surat-surat kelengkapan kamu saja," ujar salah satu anggota polisi sambil tersenyum.

"Ohh iya baik, Ibu. Ini SIM saya, ini STNK saya," balas siswi tersebut.

"Wih hebat, sudah tertib berlalu lintas kamu. Pertahankan yaa," timpal petugas tersebut.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan Kopol Yunita Rungkat kemudian memberikan siswi tersebut hadiah berupa helm. Helm yang didominasi oleh warna biru itu kemudian diminta untuk dikenakan langsung dan siswi itu diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya kembali.

Sebagai informasi, Operasi Keselamatan Jaya 2024 digelar selama 14 hari, mulai tanggal 4-17 Maret 2024. ● mei



RAKORNAS PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) bersama Inspektur Jenderal Kemenkes Murti Utami (kiri) dan Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Yulianto Prihandoyo (kanan) memberikan keterangan pers usai Rakornas Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/3). KPK menyoroti masih adanya vendor yang melakukan kesepakatan di luar hukum dalam proyek pengadaan barang dan jasa dimana berdasarkan data KPK pemberian fee proyek hingga 15 persen dalam memuluskan jalannya sebuah proyek menjadi kasus yang kini lazim ditemukan.